

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2010, **Dasar-dasar Politik Hukum**, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zubakhrum Tjenreng, MB, 2016, **Pilkada Serentak (penguatan demokrasi di Indonesia)**, Pustaka Kemang, Depok.

Hans Kelsen, 2015, **General Theory of Law and State** (New York : Russel and Russed, 1971), terj. Raisul Muttaqien (Bandung : Penerbit Nusa Media, cetakan X, Desember 2015).

Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H., 2011, **Pembubaran Partai Politik “Pengaturan dan Pembubaran Partai Politik dalam Pegulatan Republik”**, Jakarta, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011, Cetakan Ke1.

Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., 2012, **PARTAI POLITIK DALAM PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA**, Malang, Setara Press (Kelompok Penerbit Instrans).

Didik Supriyanto, Lia Wulandari, September 2012, **BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan**, Yayasan Perludem, Cetakan 1.

Majda El Muhtaj, 2012, **Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia**, Jakarta, Kencana.

Abdul Hakim Aziz, 2011, **NEGARA HUKUM dan DEMOKRASI DI INDONESIA**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rozikin Daman, **Hukum Tata Negara**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Moh. Kusnardi, 1987, **Hukum Tata Negara Indonesia**, Jakarta, Sinar Bakti.

Titik Triwulan Tutik, 2007, **Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD1945**, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Miriam Budiarto, 1982, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia.

Ni'matul Huda, 2006, **Hukum Tata Negara Indonesia**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Tjuk Atmadi, 2004, **Bung Hatta : Demokrasi Kita “idealisme dan realita unsur yang memperkuatnya”**, Jakarta, Balai Pustaka.

Soebagio, Desember 2009, **DISTORSI dalam TRANSISI DEMOKRASI DI INDONESIA**, Makara, Sosial Humaniora, Vol 13,

Didik Supriyanto dan agus Mellaz, **Ambang Batas Perwakilan : Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan**

Proporsionalitas Hasil Pemilu, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (perludem).

Hafid, Emmy, **Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik**, Transparency International Indonesia dan Transparency International, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, **Pengantar Penelitian Hukum**, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Publlishing, Malang.

Veri junaidi, dkk, 2011, **Anomali Keuangan Partai Politik**, kemitraan bagi perbaruan tata pemerintahan, perludem.

ARTIKEL, MAKALAH, JURNAL

Febrika Nurtiyas, 2016, **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROPINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014**, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Al Rafni, Suryanef, dan aina, 17 oktober 2015, “**Pendanaan Partai Politik Untuk Pendidikan Politik**”, makalah Prosiding Seminar Nasional 70 tahun

Indonesia Merdeka (prospek dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam menanggapi persoalan bangsa), UNPPRESS, Padang.

Lutfhi Surya Atmoko, 2015, **Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Klaten**, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Muhammad Luthfi Aldila, 2016, **Implikasi Bantuan Keuangan Terhadap Pengaturan Pengelolaan Keuangan Partai Politik Dalam Konteks Transparansi Dan Akuntabilitas**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, surakarta.

INTERNET

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, **Gagasan Negara Hukum Indonesia**, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses tanggal 23 Oktober 2016, jam 22.48 WIB.

Laporan Singkat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 23 Mei 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8).

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Keputusan menteri tenaga kerja nomor 17 tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak.

Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18).

Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum

(Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1239).

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu